



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

AKU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 24);

AKY

12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Dinas Perhubungan
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin Dinas Perhubungan, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan :
S1/S2 Teknik Transportasi/Teknik/Administrasi Negara/Ilmu Pemerintahan/Sosial Politik
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia
 - b. Diklat Teknis Bidang Perhubungan Darat
 - c. Diklat Teknis Keselamatan Transportasi
 - d. Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - e. Diklat Manajemen Strategik.
 - f. Diklat Pengelolaan barang.
 - g. Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - h. Diklat Kehumasan.
 - i. Diklat Pengelolaan Proyek.

c. Pengalaman kerja :

- 1) Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/ Badan/ Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 2) Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/ Badan/ Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)	WAKTU KERJA EFEKTIF (MENIT)	BEBAN KERJA (JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN)	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun perencanaan di bidang perhubungan;	Konsep Dokumen	9000	75000	1	0,1200	
2	memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;	Kegiatan	12000	75000	1	0,1600	
3	mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;	Kegiatan	18000	75000	1	0,2400	
4	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang di perhubungan;	Kegiatan	6000	75000	4	0,3200	
5	melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;	Kegiatan	900	75000	3	0,0360	
6	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bina transportasi, pengendalian transportasi, pengembangan sistem transportasi	Kegiatan	6000	75000	3	0,2400	
7	melaksanakan administrasi/penatausahaan; dan	Kegiatan	6000	75000	1	0,080	
8	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Kegiatan	6000	75000	1	0,080	
JUMLAH						1,2760000	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	ATK pakai habis	Bahan penunjang kegiatan
2.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
3.	Surat/Naskah Dinas	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
4.	Telaahan staf	Bahan pertimbangan atasan
5.	Data tentang penyelenggaraan kesekretariatan Dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
6.	Data tentang penyelenggaraan kegiatan bidang teknis lingkup dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
7.	Materi Peraturan Perundang-undangan	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
8.	Materi Keputusan Menteri	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
10.	Materi Peraturan Bupati Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
11.	Materi Keputusan Bupati Sumbawa	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

8. Peralatan Kerja :

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Laptop dan perangkatnya	Alat input hasil kerja
2.	Koneksi internet	Alat unduh informasi/data/referensi/peraturan perundangan yang relevan
3.	Kendaraan dinas	Alat pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4.	Peraturan perundang-undangan	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
5.	ATK	Alat untuk menulis, memeriksa dan mengoreksi
6.	SOTK Dinas Perhubungan	Pedoman penyelenggaraan dan membagi tugas kepada bawahan
7.	Visi, misi dan RPJMD	Penyusunan rencana program dan kegiatan unit kerja
8.	Dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan	Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas	Dokumen Rencana Kerja
2.	Kerjasama dengan pihak terkait	Frekuensi kegiatan
3.	Terbagi dan terlaksananya semua tugas bawahan	Kejelasan pembagian tugas
4.	Penetapan sasaran pembangunan bidang	Dokumen

	perhubungan	
5.	Pembinaan dan pengelolaan kesekretariatan dinas	Frekuensi kegiatan
6.	Penerapan Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan tugas	Dokumen Pedoman Kerja
7.	Koordinasi pelaksanaan tugas manajerial dan teknis	Kegiatan
8.	Laporan	Dokumen Kinerja

10. Tanggung Jawab :

- Kebenaran Rencana Kerja Tahunan Dinas
- Kebenaran Kerjasama dengan pihak terkait
- Kebenaran Terbagi dan terlaksananya semua tugas bawahan
- Kebenaran Penetapan sasaran pembangunan bidang perhubungan
- Kebenaran Pembinaan dan pengelolaan kesekretariatan dinas
- Kebenaran Penerapan Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan tugas
- Kebenaran koordinasi pelaksanaan tugas manajerial dan teknis
- Kebenaran Laporan.

11. Wewenang :

- Memberi tugas
- Meminta hasil kerja bawahan
- Menyetujui/menolak laporan bawahan
- Menilai bawahan
- Memberi teguran kepada bawahan
- Meminta petunjuk atasan
- Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
- Menandatangani dokumen sesuai kewenangan

12. Hubungan Kerja :

1.	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	Pejabat yang setingkat	Konsultasi dan Koordinasi
3.	Pejabat-pejabat di pemerintah provinsi, pejabat di pemerintah pusat.	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja lain	koordinasi
4.	Pejabat dalam jabatan administrator di lingkup Dinas Perhubungan	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya :

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejemuhan	Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
3.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

- a. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola manajemen transportasi
- b. Bakat Kerja :
 - 1) G : Intelektivitas
 - 2) V : Bakat Verbal
 - 3) Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 - 1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING).
 - 2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA).
 - 3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
- d. Minat Kerja :
 - 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek.
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang.
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data.
- e. Upaya Fisik :
 - 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat

- f. Kondisi Fisik :
1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
2) Umur : -
3) Tinggi badan : -
4) Berat badan : -
5) Postur badan : -
6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja :
1) D1 : Mengkoordinasikan
2) O0 : Menasehati
3) O8 : Menerima Instruksi

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dsengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

17. Kelas Jabatan : 14

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

1. Nama Jabatan : Pengelola Layanan Operasional

2. Kode Jabatan :

3. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

a. JPT Utama :

b. JPT Madya :

c. JPT Pratama : Kepala Dinas Perhubungan

d. Administrator : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

e. Pengawas : Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan

f. Pelaksana : Pengelola Layanan Operasional

g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan instansi pemerintah.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan : D. III (Diplom Tiga)

b. Kursus/Diklat

1) Penjenjangan :-

2) Teknis :

3) Diklat Pengelolaan Data

c. Pengalaman kerja : Tidak dipersyaratkan

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan

: Pengelola Layanan Operasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data dan Informasi	Kegiatan	6.000	75.000	3	0,240	
2	Mengumpulkan dan memeriksa data dan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja	Kegiatan	18.000	75.000	3	0,720	
3	Menganalisis data dan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk	Kegiatan	24.000	75.000	3	0,960	
4	Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan data dan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan di olah	kegiatan	12.000	75.000	3	0,480	
5	Mencatat perkembangan dan permasalahan data dan informasi secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya	Kegiatan	6.000	75.000	3	0,240	
6	Mengolah dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	kegiatan	12.000	75.000	3	0,480	
7	Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	kegiatan	3.000	75.000	3	0,120	
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	3.000	75.000	3	0,120	
JUMLAH						3,360	
PEMBULATAN						3	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Konsep surat	Bahan Kerja
3.	Data terkait	Bahan kerja

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Perangkat komputer	Pendukung pelaksanaan tugas
2.	Peraturan perundang-undangan	Petunjuk kerja
3.	ATK	Pendukung pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Program kerja terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan	Dokumen
2.	bahan dan alat perlengkapan pengelola laporan Seksi Lingkungan Perhubungan	Kegiatan
3.	laporan Seksi Lingkungan Perhubungan	Laporan
4.	Koordinasi dengan unit kerja lain terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan	Kegiatan
5.	Evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan	Laporan pelaksanaan kegiatan

10. Tanggung Jawab:

- Kebenaran program kerja terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan
- Kebenaran bahan dan alat perlengkapan pengelola laporan penyelenggaraan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan
- Kebenaran laporan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan
- Kebenaran koordinasi dengan unit kerja lain terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan
- Kebenaran evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan

11. Wewenang:

- Meminta petunjuk atasan
- Melaporkan kegiatan kepada atasan

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Jabatan Pelaksana Lingkup Seksi Lingkungan Perhubungan	Jabatan yang setingkat	Koordinasi

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejemuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : mengoperasikan computer, pengolahan data
- b. Bakat Kerja :
 1) G : Intelegensia
 2) V : Bakat Verbal
 3) Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIATY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
- d. Minat Kerja :
 1) 1a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
 3) 1b : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
 1) Duduk
 2) Berbicara
 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 2) Umur : -
 3) Tinggi badan : -
 4) Berat badan : -
 5) Postur badan : -
 6) Penampilan : -

- g. Fungsi Pekerja :
1) D3 : Menyusun
2) O7 : Melayani
3) O8 : Menerima instruksi
4) B7 : Memegang
16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan pengelolaan layanan operasional di Seksi Lingkungan Perhubungan dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. Kelas Jabatan : 6

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUMBAWA.

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

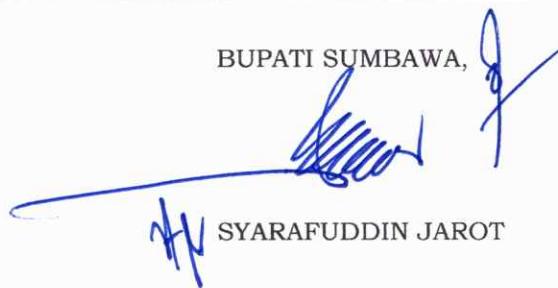
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN		
1	2	3	5	7
-	Kepala Dinas	1	1	0
Sekretariat				
-	Sekretaris Dinas	1	1	0
-	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
-	- JF Arsiparis Terampil	0	1	-1
-	- JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
-	- JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
-	- JF Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
-	- JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
-	- JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
-	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	-1
-	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	-1
-	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	-1
-	- Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
-	- Pengolah Data dan Informasi	3	4	-1
-	- Pengadministrasi Perkantoran	0	9	-9
-	- Operator Layanan Operasional	6	11	-5
-	- Penata Layanan Operasional	0	3	-3
-	- Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
-	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	1	0
-	- JF Perencana Pertama	1	2	-1
-	- JF Perencana Muda	0	1	-1
-	- JF Perencana Madya	0	1	-1
-	- Penelaah Teknis Kebijakan	3	5	-2
-	- Pengolah Data dan Informasi	1	6	-5
-	- Pengadministrasi Perkantoran	2	4	-2
-	- Penata Layanan Operasional	0	3	-3
-	- Operator Layanan Operasional	0	1	-1
Bidang lalu Lintas Jalan dan Angkutan				
-	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	1	1	0
-	- Kasi Lalu Lintas Jalan	1	1	0
-	- Penelaah Teknis Kebijakan	2	3	-1
-	- Pengawas Transportasi Darat	2	2	0
-	- Pengolah Data dan Informasi	1	4	-3
-	- Pengadministrasi Perkantoran	2	3	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		ASN		
1	2	3	5	7
	- Petugas Transportasi Darat	0	10	-10
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	- Operator Layanan Operasional	0	26	-26
	- Kasi Pengujian Sarana	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
	- Pengolah Data dan Informasi	0	5	-5
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	4	-4
	- Petugas Transportasi Darat	0	7	-7
	- Operator Layanan Operasional	0	3	-3
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	- JF Analis Kebijakan Pertama	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Utama	0	1	-1
	- JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	0	3	-3
	- JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	1	3	-2
	- JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	1	3	-2
	- JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1	1	0
Bidang Prasarana				
	- Kepala Bidang Prasarana	1	1	0
	- Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
	- Petugas Transportasi Darat	0	2	-2
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	2	-2
	- Operator Layanan Operasional	0	2	-2
	- Kasi Pengoperasian Prasarana	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	5	-4
	- Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	2	4	-2
	- Pengawas Transportasi Darat	0	2	-2
	- Petugas Transportasi Darat	0	5	-5
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	- Operator Layanan Operasional	0	14	-14
	- JF Analis Kebijakan Pertama	1	1	0
	- JF Analis Kebijakan Muda	1	1	0
	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1	-1
Bidang Pengembangan dan Keselamatan				
	- Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1	1	0
	- Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	0	1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2	5	-3

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		PEMANGKU JABATAN		
1	2	3	5	7
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- Operator Layanan Operasional	0	6	-6
	- Kasi Lingkungan Perhubungan	1	1	0
	- Penelaah Teknis Kebijakan	0	5	-5
	- Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
	- Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	- JF Analis Kebijakan Pertama	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	0	1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1	-1
	JUMLAH	50	254	-204

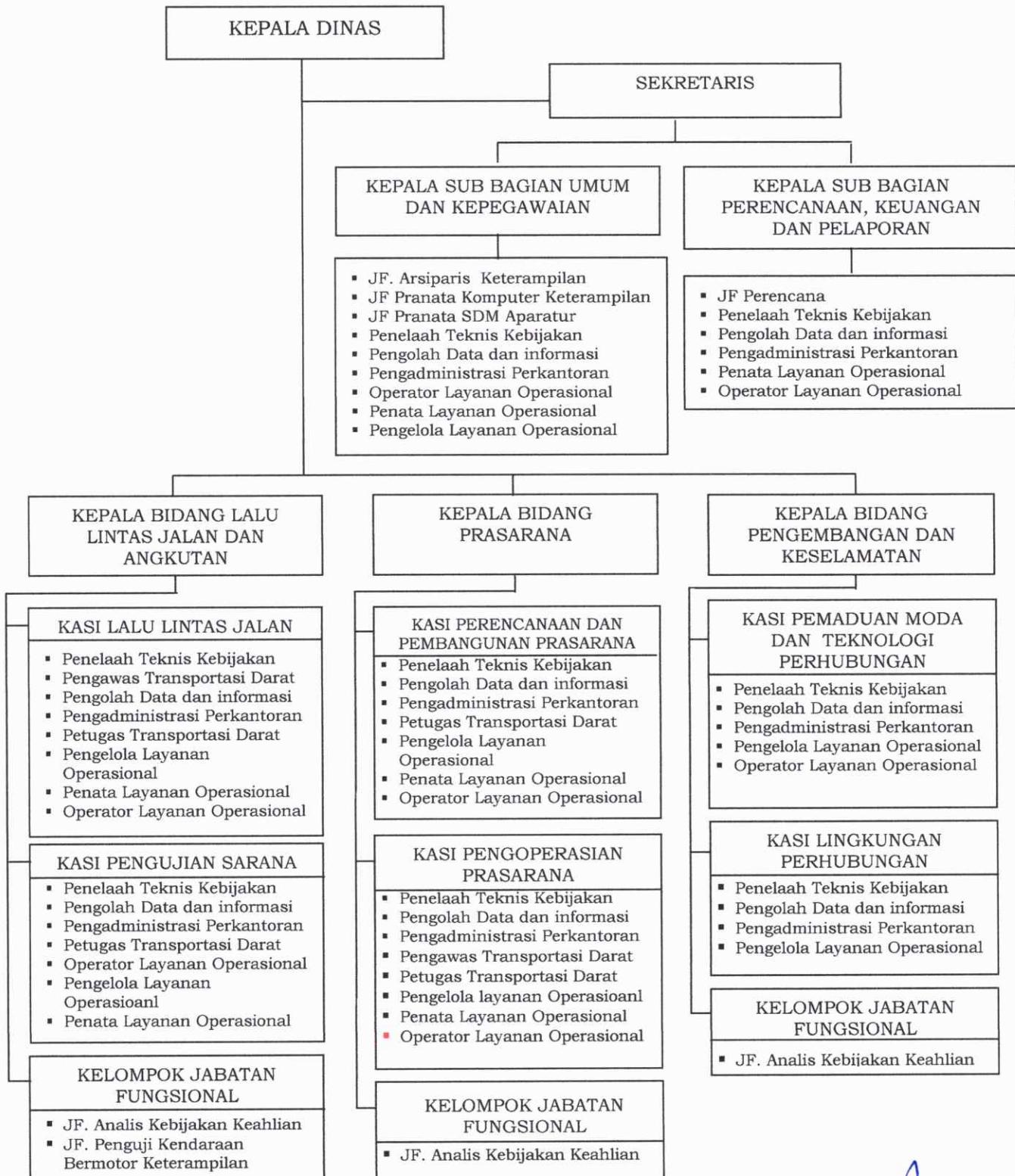
BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUMBAWA.

PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT